

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan yang baik, pemerintah terus melakukan reformasi terhadap Undang-Undang yang mengatur tata kelola keuangan negara. Reformasi ini diterbitkan demi meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Reformasi Undang-undang yang mengatur tata kelola keuangan negara berakhir pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang diterbitkan untuk menyempurnakan peraturan yang telah diterapkan sebelumnya. Peraturan Pemerintah ini menjadi dasar bagi semua entitas pelaporan dalam menyajikan laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban kepada berbagai pihak khususnya pihak-pihak di luar eksekutif.

Pengelolaan keuangan daerah mencakup keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah akan terwujud apabila dapat menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan keuangan adalah suatu hasil dari proses pengidentifikasian, pengukuran, dan pencatatan dari transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah dari pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak eksternal entitas pemerintah daerah yang memerlukannya. Laporan keuangan pemerintah daerah tersebut harus sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) (Erlina, 2008:18).

Salah satu bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan pemerintah daerah yaitu menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama satu periode pelaporan. LKPD terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektifitas dan efisiensi pemerintah daerah, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Adapun karakteristik kualitatif suatu laporan keuangan yang harus dipenuhi agar mempunyai informasi yang bermanfaat menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

Salah satu faktor utama yang dapat meningkatkan kualitas informasi laporan keuangan pemerintah adalah Sistem Pengendalian Intern (SPI). Fakta yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas 533 LKPD yang dilaporkan dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2015 menemukan 6.150 kasus kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang terdiri dari 2.353 permasalahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, 2.450 kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, dan 1.347 kasus kelemahan struktur pengendalian intern. BPK juga menemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan Perundang-Undangan sebanyak 6.016 kasus yang berdampak finansial. Selain itu terdapat permasalahan ketidakpatuhan yang tidak berdampak finansial berupa penyimpangan administrasi.

Sementara itu, berkaitan dengan kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja pada kasus kelemahan Sistem Pengendalian Intern yang ditemukan BPK, pada tahun 2016 dilakukan sidang perdana terhadap pejabat di salah satu Dinas di Kota Palembang terkait kasus dugaan korupsi bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2012-2013. Dimana pada tahun 2012 pejabat tersebut memotong dana DAK yang diberikan kepada 16 sekolah sebesar 10% sehingga mendapatkan keuntungan sebesar Rp 631.500.000. Bahkan pada tahun 2013 juga terjadi pemotongan untuk belanja modal pengadaan rehab sekolah yang dilakukan pejabat lainnya. Dimana pejabat yang bersangkutan

mendapatkan keuntungan sebesar Rp 2.724.134.000 dari hasil pemotongan tersebut. Fakta-fakta tersebut tentunya terjadi karena adanya kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja yang menyebabkan terjadinya pelaksanaan belanja di luar mekanisme APBD dan penyimpangan terhadap peraturan tentang pendapatan dan belanja.

Faktor lain yang mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan pemerintah adalah kompetensi sumber daya manusia. Kompetensi SDM yang memadai sebagai pengelola keuangan tentunya akan meningkatkan kualitas informasi laporan keuangan. Salah satu yang menjadi indikator kualitas akuntabilitas keuangan yaitu dilihat dari opini auditor eksternal (BPK) atas penyajian laporan keuangan pemerintah yang komponennya meliputi: Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Opini BPK secara bertingkat terdiri dari: Tidak Wajar (TW), Tidak Memberikan Pendapat (TMP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), dan yang terbaik adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Adapun opini BPK atas LKPD dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 dapat dilihat pada Tabel 1.1 dibawah ini.

Tabel 1.1
Opini BPK atas LKPD Tahun 2011 s.d 2015
Wilayah Sumatera Selatan

No.	Nama Pemda	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Provinsi Sumsel	WDP	WDP	WDP	WTP DPP	WTP
2.	Kabupaten OKU	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP
3.	Kabupaten OKI	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
4.	Kabupaten Muara Enim	WDP	WDP	WTP DPP	WTP	WTP
5.	Kabupaten Lahat	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP
6.	Kabupaten Musi Rawas	WDP	WDP	WDP	WTP	WDP
7.	Kabupaten Musi Banyuasin	WDP	WDP	WTP DPP	WTP	WTP
8.	Kabupaten Banyuasin	WTP DPP	WTP	WTP	WTP	WTP

9.	Kabupaten OKU Timur	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
10.	Kabupaten OKU Selatan	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP
11.	Kabupaten Ogan Ilir	WDP	WDP	WDP	WTP	WDP
12.	Kabupaten Empat Lawang	WDP	TMP	WDP	WDP	WDP
13.	Kabupaten Pali	-	-	-	TMP	WDP
14.	Kabupaten Muratara	-	-	-	TMP	WDP
15.	Kota Palembang	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
16.	Kota Lubuklinggau	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
17.	Kota Pagaralam	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP
18.	Kota Prabumulih	WDP	WDP	WTP DPP	WTP	WTP

Sumber: Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2016 BPK RI

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa kota Palembang mendapatkan opini WTP sebanyak 5 kali berturut-turut. Namun masih banyak ditemukan penyimpangan-penyimpangan di Kota Palembang yang mengindikasikan bahwa pada pemerintah Kota Palembang masih banyak terdapat kelemahan-kelemahan, baik itu kelemahan pada Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan, kelemahan pada Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja, atau kelemahan pada Struktur Pengendalian Intern. Kelemahan tersebut dapat disebabkan oleh kurang memadainya kompetensi SDM pengelola keuangan pada pemerintah daerah ataupun penyajian laporan keuangan yang belum sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Indriasari dan Nahartyo (2011) menunjukkan bahwa kapasitas sumber daya manusia tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Ketidaksignifikanan ini mungkin disebabkan kondisi kapasitas sumber daya manusia di sub bagian akuntansi/tata usaha keuangan yang belum mendukung. Sedangkan menurut hasil penelitian Modo, Saerang, dan Poputra (2016), kapasitas sumber daya manusia dan pengawasan internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan.

Berdasarkan fenomena-fenomena terkait kelemahan sistem pengendalian intern yang terjadi di Pemerintah Kota Palembang dan pro kontra mengenai pengaruh sumber daya manusia terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah, maka peneliti tertarik untuk meneliti **“Analisis Faktor-Faktor yang**

Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palembang”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Sistem Pengendalian Intern (SPI) mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan pemerintah?
2. Apakah Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan pemerintah?
3. Apakah Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan pemerintah?

1.3 Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah maka penulis membatasi ruang lingkup pembahasan yaitu hanya pada Sistem Pengendalian Intern (SPI), Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), dan Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Dinas Kota Palembang dimana diambil sampel staff/pegawai yang melaksanakan fungsi akuntansi/keuangan di Dinas tersebut.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang diuraikan di atas, maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh Sistem Pengendalian Intern (SPI) terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah.
2. Untuk mengetahui pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah.

3. Untuk mengetahui pengaruh Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diharapkan dengan dilaksanakannya penelitian ini antara lain:

1. Bagi peneliti, hasil penelitian diharapkan dapat menambah wawasan mengenai kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah dan memperkuat penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan pengaruh Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan pemerintah.
2. Bagi pemerintah daerah, sebagai masukan untuk meningkatkan kualitas informasi laporan keuangan pemerintah.
3. Bagi akademisi, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai tambahan wacana penelitian dan pertimbangan untuk melakukan penelitian-penelitian selanjutnya.

1.5 Sistematika Penulisan

Guna membuat laporan ini lebih terarah, maka secara garis besar penelitian ini terdiri dari lima bab dimana tiap-tiap bab memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Berikut ini akan diuraikan secara singkat mengenai sistematika penulisan penelitian ini yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini penulis menguraikan latar belakang pemilihan judul, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi teori-teori pendukung yang digunakan dalam penulisan untuk melakukan analisis dan pembahasan. Adapun teori-teori yang digunakan yaitu Teori Keagenan, Teori Stakeholder, Laporan Keuangan, Kualitas Informasi, Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM).

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang jenis dan sumber data, model penelitian, metode analisis data yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang hasil yang didapat setelah mengadakan penelitian yang mencakup gambaran umum penelitian, dan hasil penelitian dengan analisis regresi berganda.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi simpulan berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan penulis dan dari simpulan dapat memberikan saran sebagai masukan untuk penelitian selanjutnya.